

Analisis Peran Perdagangan Maritim Terhadap Sejarah Perekonomian ASEAN

Analysis of the Role of Maritime Trade in ASEAN Economic History

Aditya Darma*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Ahmad Fakhri Hutaauruk, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Simalungun, Indonesia

Benny Junior Kaban, Sekolah Menengah Atas Swasta Methodist Binjai, Indonesia

ABSTRACT

Maritime trade is an economic activity carried out through sea routes such as exports and imports, the main function of maritime trade is to improve the economy of a country and the welfare between entrepreneurs, this maritime trade is not only carried out by two countries but can even be between one country and one organization that has members with several countries in it such as ASEAN. The purpose of this study is to provide knowledge about the role of maritime trade in the history of the economy in ASEAN. The results of this study explain the influence of maritime trade on the economic development of ASEAN and ASEAN member states. ASEAN is an organization formed with the aim of improving the economies of the countries in Southeast Asia consisting of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Cambodia, Philippines, Myanmar, Laos. This study uses qualitative research with a library study approach to research accurate and relevant data so that readers can easily understand the range of knowledge from this research.

ARTICLE HISTORY

Received 12/03/2024

Revised 06/04/2024

Accepted 07/04/2024

Published 08/04/2024

KEYWORDS

Maritime trade; History; ASEAN economy.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ aditya.darma@fkip.uisu.ac.id

PENDAHULUAN

Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sebagian besar merupakan wilayah maritim, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan lautan. Salah satu komponen utama ekonomi maritim adalah perdagangan maritim. Hal ini termasuk mengangkut barang melalui laut menggunakan kapal kargo dan kontainer. Pelabuhan besar di seluruh dunia berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional salah satunya yaitu ekspor dan impor (Delabastita & Maes, 2023). Jaringan sosial, ekonomi dan politik memainkan peran dalam sejarah ekonomi. Sekarang diakui secara luas bahwa jaringan tersebut merupakan pusat pemahaman interaksi historis dalam perdagangan, bisnis, dan penyebaran pengetahuan dan teknologi. Jaringan tersebutlah yang menjadi dasar dari suksesnya sejarah perdagangan maritim di ASEAN.

Sejarah perdagangan maritim telah memainkan peran sentral dalam pengembangan ekonomi global dan regional. Dalam konteks ASEAN, yang terdiri dari negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang dan jalur perdagangan laut yang penting, perdagangan maritim menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam memahami kondisi ekonomi saat ini dan mengantisipasi arah perkembangan di masa depan, penting untuk mempelajari sejarah perekonomian ASEAN. Perdagangan maritim telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi ASEAN, memengaruhi pola perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi regional. ASEAN bukan hanya sekadar sebuah kawasan yang menerima dampak perdagangan maritim global, tetapi juga aktor yang berperan dalam membentuk regulasi perdagangan, infrastruktur maritim, dan kerja sama regional di bidang perdagangan maritim.

Perdagangan maritim juga telah berpengaruh besar pada sejarah perkembangan perekonomian di dunia, sejarah perekonomian dan perdagangan dunia tidak pernah lepas dari sejarah Revolusi Industri (Bai & Wu, 2023). Revolusi memiliki fokus khusus pada budaya dan ideologi pada awalnya dan kemudian menyaksikan konflik nasional dan pergolakan sosial sebagai latar belakang kelas buruh. Lancarnya kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang produktivitas tidak pernah lepas dari buruh karena buruh merupakan tenaga utama dalam melakukan kegiatan produksi (Paker et al., 2023). Buruh tidak terampil di perkotaan industri sering diyakini sebagai pekerja biasa yang dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek sementara, biasanya pada siang hari, dengan tingkat upah yang menanggapi aturan penawaran dan permintaan pekerjaan adalah kerja berlebihan selama beberapa hari dan kemudian tidak ada pekerjaan sama sekali.

Lahirnya revolusi dengan menciptakan mesin uap ternyata dapat meningkatkan produktivitas dan mempersingkat waktu proses produksi berkat Revolusi Industri. Semua orang tahu bahwa Revolusi Industri membawa perubahan besar dan cepat dalam teknologi mesin, terutama dalam ekonomi. Mesin Uap digunakan dalam pompa, lokomotif dan kapal laut, dan sangat penting dalam Revolusi Industri. Hal tersebut menjadi cikal bakal dari perkembangan pelayaran maritim yang di gunakan para pedagang untuk mencari dan menjual sumber daya alam .dengan adanya mesin uap membuat jangkauan kapal lebih jauh dibandingkan menggunakan tenaga manusia ataupun alat dayung tradisional lainnya, melalui perdagangan maritim manusia bisa berinteraksi bahkan karena adanya kebutuhan yang besar menjadikan cikal bakal dari terbentuknya berbagai organisasi dagang antar sesama pedagang.

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup Indo-China dan semenanjung Melayu serta kepulauan di sekitar Asia Tenggara memiliki letak yang ditinjau dari berbagai aspek baik itu dari segi astronomi, geografi, politik, ekonomi serta sosial serta keadaan alamnya. Letak dari Asia Tenggara yang sangat strategis menjadikan kawasan ini alur perdagangan global baik jalur maritim maupun darat. Dalam era global yang berkembang dengan sangat pesat mendorong negara yang ada di dunia terus melakukan perubahan sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Pada wilayah regional Asia Tenggara saat ini menghadapi berbagai permasalahan di masing-masing negara di Asia Tenggara dan tantangan perekonomian (Anggih, [2019](#)).

Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup luas dan cukup berpengaruh di kancah dunia. Asia Tenggara dipilah dalam dua kelompok, yakni Asia Tenggara Daratan yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Asia Tenggara Maritim yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste (Ni'mah, [2022](#)). ASEAN adalah salah satu organisasi atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara Kawasan ASEAN sendiri merupakan salah satu kawasan yang memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik apabila dibandingkan dengan negara di kawasan luar ASEAN. Negara di kawasan ASEAN terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di negaranya sehingga dapat bersaing dengan negara tetangga maupun negara lain di luar kawasan Asia Tenggara (Safitri, [2018](#)).

Kebutuhan primer setiap negara yang berdaulat, karena perkembangan ekonomi suatu negara menjadi faktor terbesar kesuksesan negara tersebut. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat dari jumlah gedung-gedung pencakar langit di pusat Kota, banyaknya jalan TOL sebagai penyambung antar daerah atau provinsi, pertamanan yang indah di samping dan di setiap persimpangan jalan (Akmal & Ghozali, [2017](#)). Indikator perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi peran perdagangan maritim bagi perkembangan perekonomian di negara-negara yang menjadi anggota ASEAN.

Penelitian ini mengindikasikan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana perdagangan maritim telah memengaruhi sejarah perekonomian di kawasan ASEAN, di mana studi ini kemungkinan dilakukan dalam konteks ASEAN, yang merupakan sebuah organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Fokus utama studi ini adalah pada perdagangan maritim. Perdagangan maritim telah menjadi elemen penting dalam sejarah ekonomi dunia, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki akses laut yang luas, seperti ASEAN. Perdagangan maritim mencakup berbagai aspek, mulai dari perdagangan barang hingga perdagangan jasa, seperti transportasi laut, logistik, dan sebagainya.

Peran perdagangan maritim dalam membentuk dan memengaruhi sejarah ekonomi ASEAN. Hal ini dapat mencakup pengaruh perdagangan maritim terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pola perdagangan, integrasi regional, dan lain-lain Terdapat aspek analisis historis dalam judul ini, yang menunjukkan bahwa studi ini akan memeriksa bagaimana perdagangan maritim telah memainkan peran dalam perkembangan ekonomi ASEAN dari masa lalu hingga sekarang. Tujuan dari studi ini mungkin termasuk untuk memahami bagaimana perdagangan maritim telah membentuk struktur ekonomi ASEAN, mempengaruhi kebijakan ekonomi regional, mendukung integrasi ekonomi ASEAN, atau mungkin untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan perdagangan maritim di masa depan. Dengan demikian, latar belakang dari judul ini melibatkan konteks ASEAN, perdagangan maritim sebagai fokus utama, analisis sejarah untuk memahami peran perdagangan maritim dalam perkembangan ekonomi ASEAN, dan tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui studi tersebut.

Perdagangan maritim telah lama menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sejarah perdagangan maritim di wilayah ASEAN mencakup berbagai periode, dari perdagangan tradisional hingga era

modern. Latar belakang ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perdagangan maritim dalam sejarah ekonomi ASEAN. Sejarah ekonomi ASEAN telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perdagangan maritim, kolonialisme, dan perkembangan politik. Dengan melihat kembali sejarah perdagangan maritim di kawasan ASEAN, analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal telah membentuk perekonomian regional. Hal ini penting untuk memahami dinamika ekonomi ASEAN saat ini dan potensinya di masa depan.

ASEAN telah berusaha untuk meningkatkan integrasi ekonominya, dan perdagangan maritim merupakan salah satu aspek penting dalam hal ini. Dengan menganalisis peran perdagangan maritim dalam sejarah perekonomian ASEAN, dapat lebih dipahami bagaimana integrasi ekonomi regional telah berkembang seiring waktu. Penelitian ini mungkin akan memeriksa sejauh mana perdagangan maritim telah menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hal ini meliputi analisis terhadap kontribusi perdagangan maritim terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan sektor ekonomi terkait lainnya.

Analisis juga dapat menyoroti bagaimana perdagangan maritim telah membentuk atau mengubah struktur ekonomi di negara-negara ASEAN. Misalnya, bagaimana perdagangan maritim mempengaruhi sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, industri, dan jasa di kawasan tersebut. Perdagangan maritim telah mendukung integrasi ekonomi regional di ASEAN. Ini melibatkan evaluasi terhadap peran perdagangan maritim dalam pembentukan pasar tunggal ASEAN, penciptaan kawasan perdagangan bebas, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang melibatkan studi pustaka. Darmalaksana menyebutkan bahwa dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka adalah bersumber dari kepustakaan, baik primer maupun sekunder digunakan dalam jenis penelitian kualitatif ini (Darmalaksana, [2020](#)). Tujuan dari penggunaan metode studi pustaka ini yaitu untuk mencari, memperoleh, dan mempelajari data melalui metode penelitian kualitatif dalam studi pustaka (Adlini et al., [2022](#)). Studi pustaka melibatkan pengumpulan data melalui pencarian sumber dan rekonstruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian kualitatif telah ada. Ketika hasil penelitian ditulis dalam bentuk artikel jurnal, biasanya diminta untuk mencantumkan metode penelitian. Karena itu, mengingat bahwa artikel jurnal ini ditulis secara singkat, padat, sederhana, dan tepat, maka cukup jelas bahwa pemilihan metode yang tepat di butuhkan untuk mendapatkan data yang cepat dan tepat.

Dalam penelitian ini, metode studi pustaka digunakan, yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan. Ada beberapa tahap studi pustaka dalam penelitian ini: menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pencarian sumber daripada literatur. Bahan seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya literatur yang dikumpulkan dari berbagai referensi telah diteliti secara mendalam dan harus mendalam untuk memungkinkan dukungan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya.

PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Perekonomian di ASEAN

Pada awal 1960-an, negara-negara Asia Tenggara mengalami ketegangan dan konflik. Ada kekhawatiran tentang perluasan pengaruh komunisme, dan permasalahan perbatasan dan konflik regional lainnya. Negara-negara ini mencari cara untuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan mereka (Adiasmara, [2013](#)). Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, menandatangani Deklarasi Bangkok.

Dokumen ini menggaris bawahi komitmen untuk memperkuat kerja sama regional dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Brunei bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984, diikuti oleh Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Sejak itu, ASEAN telah berkembang menjadi organisasi regional yang terdiri dari 10 negara anggota. ASEAN dikenal dengan prinsip-prinsip dasarnya, seperti non-intervensi, saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, serta kerja sama ekonomi dan sosial. Tujuan ASEAN meliputi pembangunan ekonomi, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas, serta

peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, politik, dan budaya. Sejak berdirinya, ASEAN telah berperan penting dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara dan mempromosikan kerja sama regional. Organisasi ini terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perkembangan global, seperti isu-isu keamanan, ekonomi, dan lingkungan (Fauzi, [2008](#)).

Selain itu, Deklarasi Bangkok juga mengambil sebagian makna dari Piagam PBB, yaitu terkait memajukan perdamaian regional. Lengkapnya, Deklarasi Bangkok menegaskan pada pentingnya para negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan penuh pada keadilan dan aturan hukum dalam berhubungan baik dengan sesama negara anggota berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB (Indrawan, [2021](#)).

ASEAN adalah asosiasi ekonomi dan geopolitik dari negara-negara Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini anggota ASEAN mencapai 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kemajuan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, dan meningkatkan peluang bagi negara-negara anggotanya untuk secara damai membahas perbedaan mereka. Salah satu aspek ekonomi Asia Tenggara yang paling penting adalah perdagangan maritim. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) menyumbang 22% dari hasil perikanan tangkap dan akuakultur global pada tahun 2020 (Meliala & Prakasa, [2023](#)). Selain itu, fakta-fakta seperti perjalanan 3 miliar ton kargo laut internasional melalui Asia Tenggara pada tahun 2017 dan sepertiga dari pengiriman global melalui koridor laut ASEAN secara teratur menunjukkan nilai dan potensinya.

Perekonomian di ASEAN tidaklah terlepas dari upaya pembangunan yang berjalan di Kawasan ini. Pembangunan perekonomian yang terjadi di ASEAN tidak terlepas dari adanya perubahan dalam sistem ekonomi yang ada di Negara-negara Asia Tenggara. Ada tiga golongan pembangunan yaitu:

- 1) Pembangunan sebagai sebuah proses panjang transformasi masyarakat (*development as a long-term process of structural societal transformation*). Pembangunan adalah proses panjang transformasi masyarakat yang menekankan perubahan mendasar dalam struktur sosial. Hal ini terjadi melalui transformasi ekonomi, seperti peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri dan teknologi, yang memicu perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk meningkatkan taraf hidup. Perpindahan ini menciptakan dinamika sosial baru, termasuk pembentukan kelas-kelas sosial melalui hubungan industrial yang berkembang.
- 2) Pembangunan sebagai target yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dengan target-target tertentu yang hendak dicapai (*development a short-to medium-term outcome of desirable targets*). Pembangunan merupakan pencapaian target-target tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Proses ini melibatkan perencanaan yang difokuskan pada bidang-bidang tertentu, seperti yang terlihat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di era Presiden Soeharto. Repelita menggariskan tujuan-tujuan spesifik, misalnya Repelita I (1969-1974) fokus pada kebutuhan dasar dan infrastruktur pertanian, sementara Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura melalui transmigrasi. Proses ini menuntut konsentrasi pemerintahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
- 3) Pembangunan sebagai sebuah model dominan yang mengikuti gaya barat dalam menuju modernitas (*development as a dominant discourse of western modernity*). Pembangunan sebagai model dominan yang mengejar modernitas Barat, menghasilkan kontroversi apakah perubahan yang ditimbulkannya di negara-negara berkembang dianggap positif atau negatif. Model ini mencerminkan hubungan budaya antara Barat dan Timur.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh ASEAN terdiri dari lautan berikutan dengan sumber-sumber di dalamnya, Pegunungan dan berbukit serta sungai yang mampu menopang sektor perekonomian yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat, serta terdiri dari hutan-hutan yang dapat menopang sektor kehutanan, belum lagi dengan hasil-hasil tambang yang didapat. Dan yang lebih penting lagi adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negara-negara Asia Tenggara tidak kalah banyak dan bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara-negara di luar Asia Tenggara.

Melihat sumber daya yang dimiliki oleh Asia Tenggara tentunya terdapat harapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Namun pada kenyataannya perkembangan perekonomian Asia Tenggara masih tertinggal

dibandingkan negara maju, walaupun perlu disisihkan bahwa beberapa negara di wilayah ini dapat digolongkan kepada negara dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dan tingkat kesejahteraan yang tidak kalah dari negara maju seperti Singapura dan Malaysia. Hal lain adalah dengan melihat sumber daya alam yang dimiliki negara-negara Asia Tenggara maka akan terlihat adanya pembagian kelompok ekonomi yaitu Pertanian, Perindustrian dan Jasa, namun ternyata perkembangan yang terjadi adalah pada sebagian besar negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia dan Filipina lebih memfokuskan pertumbuhannya pada perindustrian dan Jasa. Perkembangan dunia internasional melalui globalisasi menyebabkan negara-negara Asia Tenggara harus segera dan secepat mungkin untuk mengimbangnya.

Perubahan basis perekonomian itu sendiri sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah masing-masing negara terkait dengan kondisi nasional sumber daya yang dimiliki. Singapura dan Brunai Darussalam yang dulu merupakan penghasil rempah beralih kepada sektor jasa dan perindustrian, hal ini dikarenakan letak strategis Singapura sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal niaga yang hendak dan menuju Laut China Selatan maupun Samudera Hindia,. Sementara Brunai Darussalam bertransformasi menjadi negara penghasil minyak. Bagi negara-negara Asia Tenggara lain sektor pertanian semakin tergusur sebagai akibat kebijakan percepatan pertumbuhan perindustrian yang berdampak terhadap pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur penunjang, hal ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Sementara pada sisi masyarakat, dampak kebijakan perindustrian adalah kepada dibutuhkannya tenaga terdidik untuk menjalankan teknologi perindustrian yang semakin maju sehingga pertumbuhan tenaga terdidik melalui pendidikan meningkatkan gengsi untuk kemudian dapat bekerja pada sektor industri dan jasa. Namun tidak semua masyarakat Asia Tenggara mampu mengenyam pendidikan sampai pada tingkat tertentu yang menjadikan mereka dieksploitasi.

Kebijakan pemerintahan yang kurang pro terhadap pertanian menyebabkan banyaknya tenaga kerja pertanian yang beralih profesi, hal ini dikarenakan pendapatan penghasilan yang menggantungkan pada hasil produksi pertanian tidak lagi mencukupi perkembangan kebutuhan yang semakin meningkat, terlebih dengan kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan nasib petani dalam negeri, hal ini di alami oleh petani di Indonesia. Namun perlu juga untuk dipahami bahwa perkembangan perekonomian Asia Tenggara tidak terlepas dari pengalaman sejarah yang telah terjadi atas mereka. Pengalaman sejarah tersebut terkait erat dengan kolonialisme yang terjadi. Pada masa kolonialisme terdapat pembagian kelas pada masyarakat Asia Tenggara yaitu Kelompok Eropa, Timur jauh (China, India dan Jepang) dan Golongan Pribumi (Radhiansyah, [2016](#)).

Perkembangan ekonomi Asia Tenggara dapat dipengaruhi oleh Etnis Cina dalam Perekonomian Asia Tenggara. Etnis Cina mendominasi perekonomian di Asia Tenggara sudah sejak permulaan abad ke-20 M, seperti terjadi di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia, sedangkan di Myanmar dikuasai oleh orang India. Selanjutnya, pada tahun 1970-an pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi Asia Timur. Realisasi teori itu diperlihatkan dengan mengalirnya investasi langsung dari Jepang dan Taiwan terhadap negara-negara Asia Tenggara. Investasi Jepang di Asia Tenggara terbagi menjadi dua gelombang, yaitu pada periode 1975-1985 dan 1985-1990.

Pada tahun 1985 investasi Jepang sebesar 48% untuk proyek-proyek yang sebagian besar berhubungan dengan sumber daya alam. Investasi Jepang ke negara-negara ASEAN bertambah besar sejak tahun 1986. perkembangan ekonomi industri berjalan secara cepat di Vietnam dan Filipina berkat investasi asing dari Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan etnis Cina dalam perekonomian di Asia Tenggara. Peranan etnik Cina dalam perekonomian Asia Tenggara tampak pula dengan adanya pasangan bisnis etnik Cina lokal yang meningkat di Asia Tenggara dalam tahun 1980-an. Di Thailand, terjadi perkawinan silang baik antara golongan bawah dengan pedagang kecil Cina maupun antara kalangan pengusaha etnis Cina dengan kalangan elite Thailand. Di Jawa dan Sumatra, aliansi di tingkat elite jarang sekali berakhir dengan pernikahan silang. Berkaitan dengan pengalaman komunitas pengusaha Cina di Jawa dan Sumatra tampaknya cukup berharga untuk meneliti dampak ekonomi dari kebiasaan dan peran komunitas pengusaha Cina lain di Asia Tenggara.

Pada tahun 1960 di Singapura mencapai 75% dari total penduduk, Malaysia: 37% dan Thailand: 10%, ketiga negara ini mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Etnis Cina di Indonesia pada tahun 1960 hanya sebesar 2,9% dan di Filipina lebih kecil lagi, yaitu 0,67%, suatu kenyataan ekonomi di kedua negara ini berada di belakang ketiga negara tersebut. Lagi pula di Indonesia, etnis Cina dalam masa Orde Baru mendapat tekanan dari pemerintah sehingga dinamika etnis Cina terbatas dan peran mereka tidak begitu besar dalam perkembangan ekonomi. Tiongkok

merupakan pasar terbesar Vietnam dalam impor beras. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Vietnam Food Association yang menyatakan bahwa Tiongkok telah mengimpor 60% beras Tiongkok hingga tahun 2014. Dengan meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap beras, Tiongkok diperkirakan akan menjadi importir utama beras Vietnam (Devi et al., [2018](#)).

Peranan etnis Cina tidak saja terdapat di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik. Mereka melibatkan keluarga dan kroni-kroninya untuk mengurus bisnis-bisnis besar di dalam dan di luar negeri. Di Indonesia, etnis Cina mendominasi sektor komersial dan menguasai lebih dari 163 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Akibatnya, adalah lahirnya kapitalis-kapitalis besar yang sering disebut “kapitalis kroni” di Indonesia. Selain itu pertokoan-pertokoan di sepanjang jalan besar di Indonesia, khususnya di Jawa dimiliki oleh orang-orang dari etnis Cina. Meskipun jumlah pengusaha pribumi sangat besar 30.000 pada tahun 1984, tetapi perusahaan-perusahaannya miskin sumber daya sehingga ketika terjadi penurunan harga minyak tinggal 10.000 yang bisa bertahan hidup. Jumlah pengusaha pribumi itu pun masih lebih kecil persentasenya jika dibandingkan dengan pengusaha non pribumi (etnis Cina) dari total penduduk Indonesia.

Secara umum pengusaha etnis Cina lebih kuat dibandingkan dengan pengusaha pribumi. Dengan demikian etnis Cina memiliki peranan penting dalam perekonomian di Asia Tenggara terkait dengan kegiatan-kegiatannya di bidang ekonomi. Mereka bukan hanya melakukan aktivitas dalam produksi barang, distribusi barang dan pemasaran barang yang dibutuhkan manusia, melainkan juga dalam kegiatan komersial, arus uang dan percepatan perputaran uang yang meningkat sejak tahun 1970. Sebagian penghasilan dari sumber ini mengalir ke etnis Cina daripada ke kaum pribumi, sekaligus ini merupakan sumber penghasilan negara. Penghasilan negara yang lain berasal dari investasi etnis Cina (dari saham, bunga atau deposito, pinjaman dan yang lain), meskipun di Indonesia termasuk sangat kecil, tetapi di Singapura, Thailand dan Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Sudah tentu beberapa hal itu hanya sekedar contoh kecil, kegiatan komersial masih banyak yang dilakukan oleh etnis Cina yang menjadi sumber pendapatan negara (Widiyanta, [2010](#)).

Pada tahun 1970, tingkat kemakmuran nasional Jepang membuat negara-negara di Asia Tenggara merasa kecil. Sebagai contoh, pendapatan per kapita Jepang pada saat itu mencapai 10 kali lebih besar dengan GNP yang melebihi jumlah total gabungan GNP negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Para pembuat kebijakan di Jepang menyadari pentingnya untuk mendorong perekonomian Asia Tenggara dan melihat ASEAN sebagai partner, sehingga Jepang bersedia memberikan berbagai saran dan bantuan kepada negara-negara di kawasan ini setelah tahun 1970. Pada tahun 1971, Jepang mengonsentrasikan sebesar 15,6% dari total investasi luar negerinya di ASEAN, dan jumlah ini meningkat hingga 36,4% dalam 5 tahun berikutnya. Jepang juga melakukan impor dari Asia Tenggara sebesar 93% dari kebutuhannya akan tin, 90% akan karet, dan 40% akan copper, bauxite, dan kayu.

Ekspansi ekonomi dan perdagangan di awal tahun 1970-an mengembalikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi besar. Hal ini membuat gejolak di dalam negara-negara di Asia Tenggara. Ketika Tanaka datang ke Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1974, ia menghadapi beberapa demonstrasi kemarahan dan tuduhan akan arogansi bisnis Jepang. Kaum yang melakukan protes tersebut mengkritisi bahwa Jepang merupakan negara yang merasa dirinya superior dan tidak peduli kepada masalah lokal. Lebih dari itu, mereka marah karena pemerintah Jepang meminta dilakukan pembelian terhadap barang-barang Jepang dibalik adanya pemberian bantuan luar negeri. Hal ini dianggap menghalangi negara-negara miskin melakukan impor barang dengan harga rendah. Investasi di Asia Tenggara sebenarnya merupakan bagian dari usaha rekonstrukturisasi industri Jepang dan usaha untuk berintegrasi dengan ekonomi dunia pada akhir tahun 1970-an.

Pada tahun 1980, Indonesia merupakan supplier minyak terbesar kedua bagi Jepang dan menerima sejumlah besar ODA (*Official Development Assistance*) dari Jepang. Setelah perang di Vietnam, Jepang mempromosikan sebuah *joint venture* di Indonesia untuk mentransformasi negara Indonesia dan memasukkannya ke dalam area pengaruh ekonominya (*economic sphere of influence*). Pada 1976, Jepang menginvestasikan 2,6 miliar dollar AS, dengan lima perusahaan yang memiliki kendali atas investasi tersebut. Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut memiliki kendali total dan meminta Indonesia membeli barang-barang manufaktur dan bahan mentah dari Jepang dengan harga mahal. Investasi Jepang meningkat dari 7 miliar dollar AS menjadi 74 miliar dollar AS. Pada saat inilah kemudian *partnership* antara Jepang dan Indonesia dianggap tidak seimbang. Indonesia pada saat itu bergabung dengan AS dan ASEAN mengkritisi pemerintah Jepang yang dianggap memblokir investasi dari luar ke Jepang (Adiasri, [2013](#)).

Medina dan Enggriyeni menyatakan Indonesia, sebagai negara arkipolegik terbesar di ASEAN, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan maritim di ASEAN (Medina & Enggriyeni, [2022](#)). Ini melakukannya dengan membentuk forum internasional maritim baru atau berpartisipasi dalam forum internasional maritim yang sudah ada, serta menetapkan regulasi untuk negaranya sendiri. Ini karena Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan laut tertinggi di ASEAN. , Indonesia berperan sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat, Indonesia berpartisipasi pada *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN merupakan salah satu bentuk kerja sama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal, dan bagi Indonesia, kerja sama di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Selain banyak menyerap tenaga kerja, Indonesia sebagai negara maritim bisa memanfaatkan pariwisata untuk menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya.

Perkembangan perekonomian negara Filipina pada masa pemerintahan Manuel Roxas, setelah pemerintah *Commonwealth* mengadakan pembangunan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh peperangan dengan bantuan Amerika, Filipina memproklamkan kemerdekaan pada 4 Juli 1946 dengan presiden Manuel Roxas. Dalam negara Republik Filipina yang masih muda ini timbul kepentingan karena pembaharuan dalam lapangan agraria yang sangat dibutuhkan tidak dijalankan Filipina bergantung dengan Pasar Amerika Serikat menurut pejabat tinggi Komisioner Amerika Serikat Paul Mc Nutt, dibanding Negara bagian Amerika Serikat yang bergantung kepada sebagian dari Negara. Sebagai sebuah prakondisi untuk menerima bantuan rehabilitasi perang dari Amerika Serikat, membuat lebih buruk ketergantungan dengan syarat-syarat selanjutnya pertalian ekonomi kedua Negara. (Roxas, [2015](#))

Pada tahun 1947 bantuan Amerika Serikat 99 tahun sewa pada pendirian Pangkalan Militer Amerika Serikat di Filipina (Sewa dikurangi menjadi 25 tahun, dimulai pada tahun 1967). Pemerintahan Roxas memberikan amnesti kepada siapa pun yang telah bekerja sama pada Perang Dunia II, terkecuali orang-orang yang melakukan gangguan kriminal. Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial.

Tiongkok sebagai salah satu bagian dari ASEAN memiliki *soft power* yang merupakan kemampuan untuk menarik negara lain untuk mencapai tujuan (Faesal, [2019](#)). Dalam konteks *soft power* Tiongkok, kebijakannya tampak akomodatif dan partisipatif dalam organisasi regional. Apalagi Tiongkok kerap memberikan bantuan luar negeri dalam jumlah besar kepada negara mitra, apalagi hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara mitra membawa banyak manfaat.

Vietnam juga memiliki posisi penting dalam penyuplai kebutuhan produk perikanan bagi negara-negara besar seperti Uni Emirat Arab, Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, dan Cina. Pada tahun 2010 Vietnam mengeksport produk perikanan hingga 4,9 miliar US Dollar, dilanjutkan dengan tahun 2011 dengan total 6,1 miliar US dollar dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 6,8 miliar US Dollar di mana peningkatan ini mencapai 10,6 %. Sedangkan pada ekspor udang memiliki total sendiri di mana total ekspor udang mencapai 2,5 miliar US Dollar. Melihat keberhasilan kedua negara dalam menjadi eksportir produk perikanan hal ini yang membuat kedua negara berhasil menjadi mitra strategis dalam bidang maritim. Kedua negara juga memiliki kepentingan di mana kedua negara tersebut menjadi penjaga gerbang bagi rute laut untuk Kawasan Asia sehingga Kerja sama dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi ketegangan yang terjadi antara Vietnam dan Indonesia karena permasalahan penangkapan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia. Dalam kerja sama ini Indonesia dan Vietnam setuju untuk memantapkan visi dan tujuan yang sama untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang perikanan dan maritim (Nadirah, [2021](#)).

Menurut Roxas Perekonomian Filipina pada saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja - pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya, yang diperkenalkan kira-kira 2.000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng Gunung Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki. Luasnya mencakup 4.000 mil² serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) pada tahun 1995.

Pada 1998 ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung; mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6% pada 1998 dari 5% pada 1997, tetapi kembali ke sekitar 3% pada 1999, dan 4% pada 2000. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina setanding dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Strategi yang dilakukan termasuk peningkatan infrastruktur, merombak sistem pajak untuk menambah pendapatan pemerintah, juga regulasi dan penswastaan ekonomi, dan meningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar. Prospek masa depan sangat tergantung dari performa ekonomi dari dua partner dagang utama, Amerika Serikat dan Jepang, dan administrasi yang lebih terpercaya dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Filipina merupakan anggota dari Bank Pengembangan Asia.

Analisis Peran perdagangan maritim di ASEAN

Sektor maritim sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN, jadi infrastruktur maritim harus terus diperkuat untuk mendukung sektor maritim Asia Tenggara yang terus berkembang. Infrastruktur maritim memainkan peran penting dalam mendorong perdagangan maritim dan perdagangan internasional secara keseluruhan, mengingat pengaruh globalisasi ekonomi global terhadap produksi industri. Pelabuhan menjadi sangat penting bagi rantai pasokan global, dengan 80% perdagangan dunia bergantung pada infrastruktur maritim. Perekonomian besar di seluruh dunia, seperti China, menyadari hal ini. Dengan program jalur sutra maritimnya dengan ASEAN, mereka berusaha membantu perdagangan global melalui Asia Tenggara, yang memiliki keunggulan maritim yang luar biasa. Dalam Visi ASEAN *Economic Community* (AEC) 2020, ASEAN menyadari hal ini dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim. Konektivitas maritim yang kuat adalah tujuan akhir dari visi ini. Oleh karena itu, konektivitas infrastruktur maritim merupakan tujuan besar yang perlu dicapai secara bertahap. Konektivitas maritim dalam industri perikanan adalah satu langkah dalam kerangka infrastruktur maritim.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ASEAN menyumbang 22% hasil perikanan tangkap dan akuakultur global. Jika setiap profil negara ASEAN dipelajari, vitalitas dan potensi ekonomi perikanan juga dapat ditemukan. Sebagai contoh, Vietnam adalah penghasil perikanan akuakultur terbesar ke-4 di dunia pada 2019 dan Indonesia adalah penghasil perikanan tangkap terbesar kedua di dunia pada 2022 setelah Tiongkok. Dengan demikian, sektor perikanan ASEAN memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut jika ada konektivitas maritim yang memadai. Pemerintah Laos juga telah bekerja sama dengan negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Komite Perbatasan Bersama Laos-Thailand berperan penting dalam mencegah kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia. Selain itu, Laos telah menerapkan sistem *visa-on-arrival*, yang memudahkan untuk mengidentifikasi dan menyaring wisatawan yang masuk (Sarjito, [2023](#)).

Tidak diragukan lagi, dalam konteks hubungan maritim perikanan ini, masalah yang diangkat dan didiskusikan tidak hanya berkaitan dengan sektor perikanan itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kualitas dan ketahanan perikanan sebagai tujuan ekonomi utama. Kelautan yang berkelanjutan, yang muncul dari kebutuhan untuk melindungi laut dan sumber dayanya dari komersialisasi laut melalui pembangunan eksploitasi laut dan infrastruktur yang semakin berkembang. Menanggapi kebutuhan konektivitas laut yang meningkat di AEC 2020 Vision, konsep ekonomi kelautan berkelanjutan yang harus dicapai dengan cara menjadi implementasi *Sustainable Development Goals* di ASEAN dan potensi perikanan di wilayah ASEAN yang besar. Pada 2018, ASEAN memulai ASEAN *Tuna Ecolabelling* (ATEL) dengan tujuan membangun sistem produksi dan perdagangan tuna secara berkelanjutan yang dapat membantu ASEAN mengembangkan ekonomi perikanan secara internasional. Karena ada semangat untuk membangun sistem seperti itu, konektivitas maritim perikanan dapat dibuat dengan cara yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ATEL masih dilakukan tetapi kemajuan terbaru belum mencapai ke tahap perencanaan dan pelaksanaan implementasi lapangannya.

SIMPULAN

Dalam analisis ini, terungkap bahwa perdagangan maritim memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah perekonomian ASEAN. Perdagangan melalui jalur maritim telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN sejak zaman kuno hingga saat ini. Aktivitas perdagangan laut telah memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya antara negara-negara di ASEAN, menciptakan hubungan yang erat dan saling menguntungkan. Melalui perdagangan maritim, ASEAN telah menjadi pusat perdagangan global dan meraih kemakmuran ekonomi yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk terus mengembangkan infrastruktur dan kerja sama maritim guna memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global di masa depan.

REFERENSI

- Adiasmara, H. Y. (2013). Peran Asean dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dengan Malaysia Terkait dengan Permasalahan Blok Ambalat. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1–24.
- Adiasri, P. P. (2013). Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II. *Glob AI & Policy Journal of International Relations*, 1(1), 39–46.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Akmal, H., & Ghozali, M. (2017). Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara (Sebuah Kajian Historis). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v2i1.951>
- Anggih, H. S. (2019). Diplomasi Indonesia dalam Mempromosikan “Wonderfull Indonesia” di Asia Tenggara Tahun 2013-2018. Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Bai, L., & Wu, L. (2023). Political Conflict and Development Dynamics: Economic Legacies of the Cultural Revolution. *The Journal of Economic History*, 83(4), 981–1017. <https://doi.org/10.1017/S0022050723000384>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Delabastita, V., & Maes, S. (2023). The Feudal Origins of Manorial Prosperity: Social Interactions in Eleventh-Century England. *The Journal of Economic History*, 83(2), 464–500. <https://doi.org/10.1017/S0022050723000116>
- Devi, L., Windiani, R., & Putranti, I. R. (2018). Kerja Sama Vietnam dan Tiongkok dalam Menanggulangi Armed Robbery. *Journal of International Relations*, 4(2), 165–172.
- Faesal, M. H. (2019). Soft Power Tiongkok di Asia Tenggara, Studi Kasus: Hubungan Tiongkok–Kamboja Tahun 2010-2017.
- Fauzi, N. A. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN: Studi Kasus Proses Pembentukan ASEAN Community.
- Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 172–185.
- Medina, D., & Enggriyeni, D. (2022). Peranan Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim di Kawasan ASEAN. *Nagari Law Review*, 5(2), 218. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.218-227.2022>
- Meliala, A., & Prakasa, A. P. (2023). Siapakah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia? Prosiding Kontribusi Forum Akademisi SAC, 1(1), 379–392.
- Nadirah, L. (2021). Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Vietnam dalam Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 2014-2018 (Studi Kasus: Kerja Sama di Bidang Kelautan dan Perikanan).
- Ni'mah, U. L. (2022). Pengembangan Islam Asia Tenggara dalam Perekonomian Negara. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 37–48.
- Paker, M. M., Stephenson, J. Z., & Wallis, P. (2023). Job Tenure and Unskilled Workers before the Industrial Revolution: St Paul's Cathedral 1672–1748. *The Journal of Economic History*, 83(4), 1101–1137. <https://doi.org/10.1017/S0022050723000347>
- Radhiansyah, E. (2016). Asia Tenggara: Kawasan yang Tengah Berkembang. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 3(2), 57–70.
- Roxas, A. M. P. M. (2015). Asia Tenggara Pasca Perang Dunia II (Filipina).
- Safitri, A. I. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Peran Perbankan Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Universitas Islam Indonesia.
- Sarjito, A. (2023). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Tantangannya: Studi Komparasi Wilayah Perbatasan Australia, Laos, dan Indonesia. *Jurnal Pelita Kota*, 4(2), 386–404.
- Widiyanta, D. (2010). Keberadaan Etnis Cina dan Pengaruhnya dalam Perekonomian di Asia Tenggara. *Jurnal Mozaik*, 5(1).